

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.506 pulau dan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, memiliki visi Poros Maritim Dunia sejak tahun 2014. Konsep Poros Maritim Dunia menjadi fokus utama dalam lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ke tujuh. Lokasi geografis Indonesia sangat strategis di dunia maritim karena berada pada persimpangan dua samudera, Samudera Hindia dan Pasifik, serta antara dua benua, Asia dan Australia. Keunggulan letak geografis ini memberikan banyak keuntungan bagi negara tersebut. (Kementerian Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2015).

Sejak terpilih pada Oktober 2014, konsep Poros Maritim Global menjadi konsep andalan Presiden Joko Widodo untuk memposisikan Indonesia di tengah arus politik global. Konsep ini seolah menghidupkan kembali anggapan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi maritim. Konsep Poros Maritim Global yang dicanangkan Presiden Joko Widodo juga menjawab tantangan dan posisi Indonesia yang diperebutkan dalam politik global. (Herry Wahyudi, 2023).

Keuntungan yang potensial menjadi dasar utama bagi pemerintah Indonesia dalam upayanya menjadikan negara sebagai Poros Maritim Dunia. Secara ekonomi, Indonesia

memainkan peran kunci dalam perdagangan global karena 40% perdagangan internasional melalui perairannya. Dalam hal keamanan, posisi strategis Indonesia memainkan peranan penting dalam berbagai isu keamanan maritim, termasuk konflik terkait batas perairan, kejahatan di laut seperti perdagangan manusia, penyelundupan, pembajakan, penangkapan ikan ilegal, eksploitasi sumber daya alam ilegal, perdagangan narkoba, serta ancaman terhadap ekosistem laut.

Salah satu tantangan yang bisa menghalangi pencapaian visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah peredaran narkoba melalui jalur laut dengan menggunakan kapal yang tidak memenuhi standar. Saat ini, Indonesia menghadapi tingkat kerawanan yang sangat tinggi di perairan laut karena maraknya penyelundupan narkoba yang sudah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia dianggap memiliki potensi besar sebagai tempat peredaran narkoba karena wilayah geografisnya yang luas, memudahkan akses penyelundupan yang dapat menyebar ke berbagai titik dan wilayah di Indonesia.

Penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, psikotropika, serta zat-zat berbahaya lainnya merupakan permasalahan yang bersifat nasional dan global. Kejahatan narkoba telah berkembang menjadi kejahatan lintas batas yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Permasalahan ini melibatkan sistem yang kompleks, memiliki dampak global, dan berhubungan erat dengan ketahanan nasional suatu negara. Di Indonesia, masalah narkoba menjadi perhatian besar karena bukan

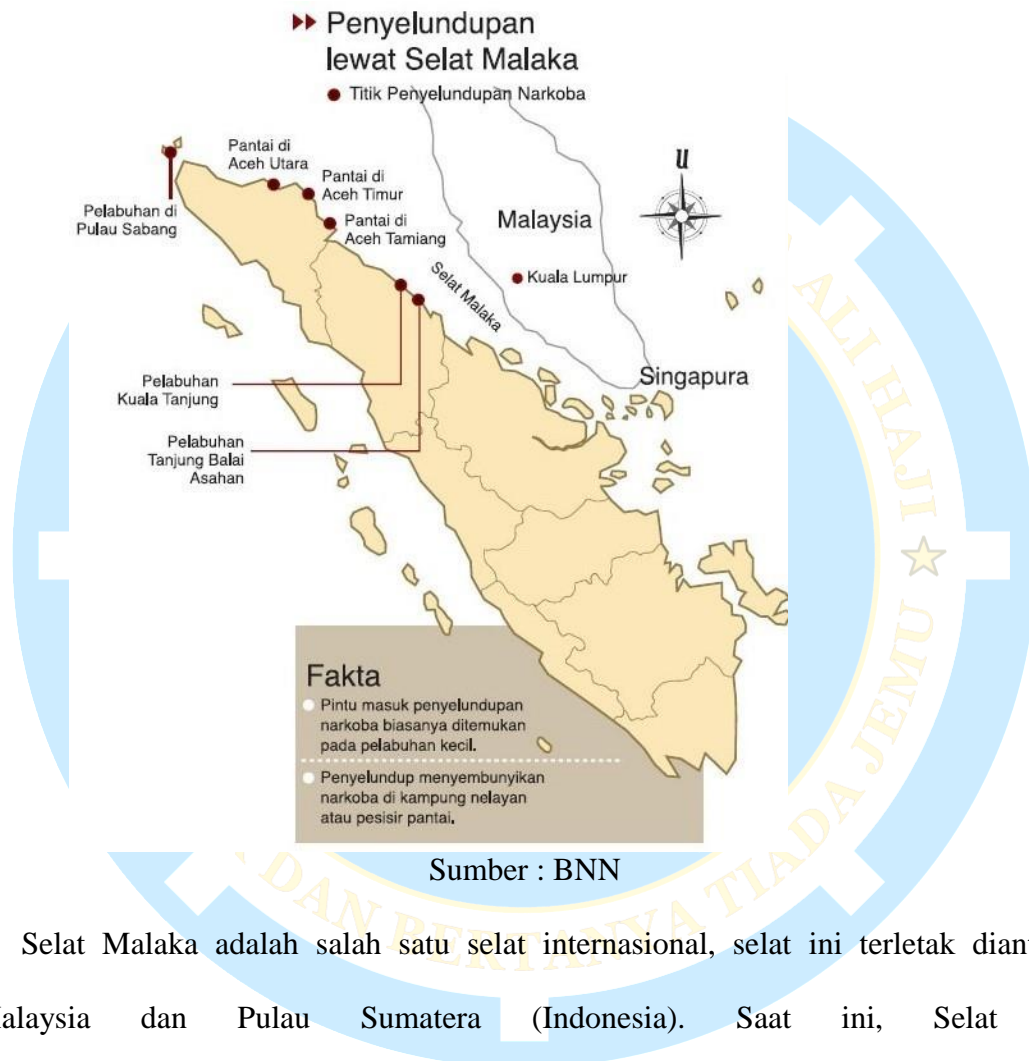
hanya sebagai konsumen, namun juga sebagai negara yang kini turut menjadi produsen narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Dengan dampak dan berkembangnya jenis kejahatan yang semakin luas, maka masyarakat internasional sepakat untuk membuat instrumen hukum internasional untuk bersama-sama memberantas kejahatan terorganisir transnasional melalui Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UNTOC). Sebagai pihak UNTOC, negara-negara terikat kewajiban untuk melakukan segala upaya, yaitu, membentuk undang-undang khusus yang mengatur kejahatan transnasional terorganisir, menjalin berbagai kegiatan kerjasama hukum antar negara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerjasama antar hukum, aparat penegak hukum, serta kerja sama antar aparat penegak hukum dan kolaborasi dalam bantuan teknis dan pelatihan. Di sisi lain, sebagai negara yang meratifikasi juga terikat oleh kewajiban seperti melakukan tindak pidana yang mungkin ditetapkan sebagai pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional, dalam hal ini berkaitan dengan penyelundupan. Untuk penyelundupan melalui laut, masing-masing Negara Pihak harus memperkuat kerja sama untuk mencegah dan menekan penyelundupan melalui perairan teritorial sesuai dengan hukum laut internasional dan juga berupaya untuk mengambil semua tindakan sebagaimana diatur dalam kasus penyelundupan. Kemudian, untuk mencegahnya, diperlukan kerja sama dan upaya lain untuk memberantas kasus penyelundupan manusia ini. (Sayed Fauzan Riyadi, 2023).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan laporan World Drug Report (WDR) memberikan landasan untuk kolaborasi antar-negara, namun upaya Indonesia dalam mengatasi peredaran gelap narkoba masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Meskipun ada upaya untuk memperkuat kekuatan, kerjasama, dan strategi pengawasan laut, bukti menunjukkan bahwa masih terjadi banyak kasus penyelundupan narkoba yang berhasil melewati pengawasan perbatasan laut. Penggunaan kemajuan teknologi oleh penyelundup untuk mengelabui pengawasan perbatasan laut menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi. Wilayah perbatasan laut Indonesia, terutama di Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, menjadi jalur yang rentan untuk penyelundupan narkoba. Ancaman serius terhadap keselamatan dan generasi muda Indonesia menuntut penanganan yang lebih ketat terhadap pengawasan peredaran narkoba di wilayah perbatasan laut. Selain itu, penegakan hukum yang belum optimal terhadap penyelundupan narkoba melalui laut memungkinkan para penyelundup untuk beroperasi tanpa terlalu banyak hambatan. Tidak hanya itu, keberadaan banyak pulau kecil, jalur rahasia, pelabuhan tersembunyi, dan kapal nelayan kecil juga memudahkan penyelundupan narkoba dari negara tetangga seperti Malaysia. Hal ini memperumit upaya penegakan hukum karena sulitnya pengawasan di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau oleh aparat keamanan. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu meningkatkan upaya kolaboratif dengan negara tetangga serta memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan lautnya, meningkatkan pemantauan dengan teknologi canggih, dan

memperkuat penegakan hukum untuk mengatasi penyelundupan narkoba yang masuk melalui jalur laut, terutama di wilayah yang rentan seperti Selat Malaka.

Gambar 1. 1 Peta Penyelundupan Narkoba Melalui Selat Malaka Ke Sumatera Utara



Selat Malaka adalah salah satu selat internasional, selat ini terletak diantara Malaysia dan Pulau Sumatera (Indonesia). Saat ini, Selat Malaka membatasi tiga negara berdaulat, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di pihak Indonesia, pulau Sumatera memiliki beberapa provinsi yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka, termasuk Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Lebih spesifik, provinsi-provinsi di Indonesia yang

memiliki wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka adalah Sumatera Utara (termasuk Kabupaten/Kota di pesisir Timur Sumatera Utara), Riau (termasuk Kabupaten/Kota di pesisir Timur Riau), dan Kepulauan Riau. Di Provinsi Sumatera Utara, beberapa Kabupaten dan Kota yang berbatasan dengan Selat Melaka meliputi Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Kota Medan (Saeri, 2013).

Selat Malaka juga salah satu dari beberapa jalur laut strategis yang dikenal dengan sebutan *SLOC (Sea Line of Communication)* dan *SLOT (Sea Line of Trade)*. Jalur ini menjadi sangat sibuk karena menghubungkan aktivitas perdagangan antara Asia dan Eropa. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, ancaman pembajakan kapal telah mulai bergeser dari Selat Malaka ke Laut Sulawesi, terutama di sekitar Laut Sulu yang berada di sebelah barat daya Filipina dan berbatasan dengan wilayah Indonesia.

Dengan meningkatnya mobilitas antar negara di perairan Selat Malaka, dampaknya juga terlihat dalam peningkatan modus kejahatan, termasuk kejahatan lintas negara. Salah satu jenis kejahatan lintas negara yang mencolok adalah penyelundupan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Terutama di perairan pulau Sumatera, kasus penyelundupan narkoba sudah menjadi hal yang tidak asing. Modus operandi yang sering digunakan oleh para pelaku penyelundupan narkoba melibatkan kerja sama dengan sindikat yang beroperasi di daerah perairan Selat Malaka, yang kemudian melibatkan pemindahan narkoba dari satu kapal ke kapal lain yang berlabuh berdampingan (*ship to ship*).

Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat-zat berbahaya lainnya merupakan isu serius yang memiliki dampak di tingkat nasional maupun internasional. Kejahatan terkait narkoba telah menjadi suatu bentuk kejahatan lintas negara yang dijalankan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Masalah ini melibatkan jaringan yang rumit dan memiliki dampak global yang berkaitan erat dengan keamanan nasional suatu negara. Kejahatan terkait narkoba di Indonesia telah menjadi permasalahan yang sangat serius. Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi narkoba, tetapi juga telah menjadi salah satu negara produsen narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Di wilayah pantai timur Sumatera Utara, lembaga maritim menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan tugas pengawasan dan penanganan keamanan serta keselamatan maritim, khususnya dalam upaya mengatasi penyelundupan narkoba melalui laut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga maritim yang ada serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Saat ini, dalam upaya menangani penyelundupan narkoba melalui laut, sinergi antara lembaga maritim di pantai timur Sumatera Utara terbatas. Kendala tersebut meliputi keterbatasan fasilitas pendukung, alokasi anggaran yang terbatas, serta kekurangan sumber daya manusia (SDM) seperti fasilitas pelabuhan, peralatan komunikasi, fasilitas keamanan, dukungan anggaran, dan personel yang diperlukan untuk menguatkan kerjasama, strategi pengawasan, serta penjagaan wilayah pantai.

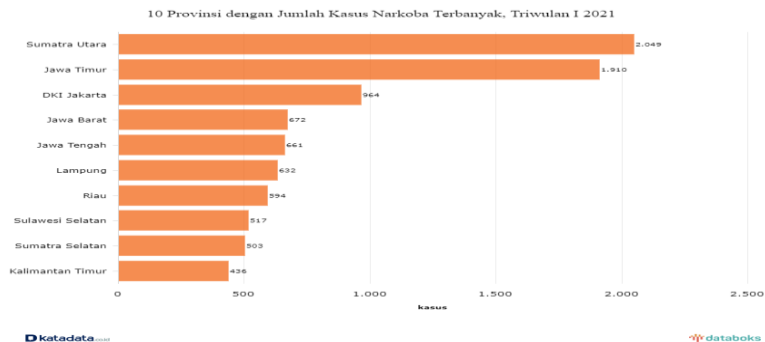
Masyarakat adat dan komunitas tradisional sering kali mempunyai hubungan mendalam dengan lingkungan laut dan bergantung pada lingkungan tersebut sebagai cara hidup mereka. Aktivitas ekonomi biru, jika tidak diatur dengan baik, dapat mengganggu komunitas ini dengan menghabiskan sumber daya laut, mencemari perairan, atau merambah lahan mereka. (Azhari Setiawan, 2023).

Penyebab meluasnya perdagangan narkoba ilegal dan penyebarannya di Indonesia dapat dijelaskan oleh dua faktor utama. Pertama, permintaan berkelanjutan dari konsumen yang mengakibatkan kebutuhan terhadap pasokan atau persediaan narkoba harus terus terpenuhi melalui kegiatan impor narkoba. Kedua, wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat strategis, dan karenanya dianggap memiliki potensi untuk menjadi pusat perdagangan narkoba.

Maraknya penyelundupan narkoba di wilayah pulau Sumatera Utara memiliki potensi mengancam keamanan wilayah dan kesehatan masyarakat, baik di wilayah pulau Sumatera itu sendiri maupun di wilayah pesisir dan sekitarnya. Dampak negatifnya termasuk kerugian finansial yang signifikan bagi negara, dan juga kerugian dalam hal Sumber Daya Manusia. Narkoba dapat menyebabkan peningkatan kasus kecanduan, penyebaran HIV/AIDS, kekerasan dalam rumah tangga, dan penurunan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia secara keseluruhan.



Gambar 1. 2 10 Provinsi Kasus Narkoba Terbanyak



Sumber: BNN, 2021

Berdasarkan gambar 1.2 bahwa Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang kini menyumbang angka kasus penggunaan narkotika tertinggi ditahun 2021. Meskipun sudah tahun 2023, Provinsi Sumatera Utara tetap mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan tingkat kasus penggunaan narkoba tertinggi. Bukti terkait hal ini muncul dalam rapat yang dihadiri oleh kepala BNN RI dan kepala BNN dari 10 provinsi tersebut.

Badan Narkotika Nasional menggelar Rapat Pimpinan dan arahan yang dipimpin oleh Kepala BNN RI, Prof. Dr. Petrus R. Golose, M.M., dengan kehadiran Sestama BNN, Irjen Pol Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K, M.M., serta para deputi dan Karo Humpro di Ruang Hoegeng BNN RI. Kepala BNNP dari 10 wilayah seperti BNNP Sumut, Kepulauan Riau, Riau, Kaltim, Maluku, DKI Jakarta, Sulsel, Jatim, Bali, dan Kalbar turut hadir dalam rapat tersebut. (BNN Sumut,2023).

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Drs Toga H. Panjaitan, bersama Kabag Umum BNNP SUMUT, Bastian SSTP, serta pejabat struktural dan fungsional BNNP SUMUT, mengikuti rapat secara virtual. (BNN Sumut, 2023).

Dalam pengelolaan manajemen perbatasan diperlukan koordinasi terpadu dari KPLP, BAKAMLA, Bea dan Cukai dan angkatan laut di pos perbatasan melalui regulasi yang jelas dan mengikuti aturan regulasi hukum internasional dan regulasi Badan Maritim Internasional (IMO) (Ady Muzwardi, 2016).

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan oleh para bandar narkoba untuk melakukan kegiatan mereka, mengincar individu, kelompok, atau organisasi, serta menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, aparat pemerintah, TNI, dan Polri, bahkan anak-anak di berbagai kota maupun desa menjadi target sasaran.

Kepala BNN RI, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, menyoroti Provinsi Sumatera Utara yang menempati peringkat teratas dalam prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia dalam rapat virtual ini, dihadiri oleh 9 provinsi lainnya. (BNN Sumut, 2023).

Dalam penyampaian beliau, penanganan kasus narkoba di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, dilakukan dengan cara yang extraordinary atau luar biasa. Golose menegaskan bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan kasus penggunaan narkoba, hal ini dibuktikan dari tingginya tingkat keterisian lembaga pemasyarakatan di daerah tersebut. Meskipun penanganan kasus narkoba dilakukan secara luar biasa, upaya ini

tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Semua kegiatan pencegahan dan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Studi mengenai penyelundupan narkoba melalui jalur laut di Provinsi Sumatera Utara memiliki kepentingan strategis, mengingat lokasinya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Malaysia. Beberapa faktor yang dinilai terlibat dalam masalah penyelundupan narkoba di jalur laut tersebut dapat melibatkan aspek geografis, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang maka pertanyaan penelitian ini akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana faktor geografis mempengaruhi terbentuknya jalur penyelundupan narkoba di Selat Malaka dalam konteks garis pantai timur Sumatera Utara.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang menjadi kegiatan penyelundupan narkoba melalui jalur laut di wilayah pulau Sumatera Utara yang terus terjadi dan bagaimana solusinya agar penyelundupan ini tidak terjadi lagi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam pengkajian ini, diharapkan agar hasilnya dapat memberikan manfaat yang luas, bukan hanya untuk peneliti sendiri, melainkan juga untuk masyarakat umum. Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang hubungan internasional dan menjadi acuan penting bagi peneliti yang akan melakukan studi lanjutan terkait dengan penyelundupan narkotika jalu laut di wilayah pulau Sumatera Utara.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini mencakup kemampuan pengembangan pola pikir, penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh, peningkatan referensi dan literatur sebagai pedoman untuk penelitian serupa, serta memberikan kontribusi pengetahuan yang berguna bagi masyarakat dan pihak terkait dalam konteks masalah yang diteliti.